



BPK

Kendala Kelola Aset

PEMERINTAH Kabupaten Pontianak mengakui dalam pengelolaan manajemen aset, terdapat sejumlah kendala yang disebabkan masih kurang memadainya pengamanan terhadap sejumlah aset, sehingga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2013.

Hal ini disampaikan Bupati Pontianak, Drs H Ria Norsan MM MH, melalui Wakil Bupati Gusti Ramlana, saat memberikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pontianak, terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2013, yang didalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Rusli Abdullah, SE, M.Si.

"Pengamanan aset setidaknya meliputi tiga substansi pokok, yakni pengamanan fisik berupa pemeliharaan kondisi dan status aset, kemudian pengamanan hukum dengan melengkapi alas hak berkenaan dengan aset tersebut, serta terakhir pengamanan pencatatan dengan melakukan pencatatan secara tertib dan berkesinambungan," katanya.

Pada sisi pengamanan pencatatan tersebut, lanjut Ramlana, perlu menjadi perhatian bersama, sehingga nilai yang disajikan sesuai dengan prinsip historical cost, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maupun peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Dengan demikian, tidak akan terjadi perbedaan nilai antara Laporan Barang Milik Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," jelas dia. *(wah)*